

---

**THE EFFECT OF THE NUMBER OF MANPOWER AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON INEQUALITY IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF WEST SULAWESI PROVINCE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS IN 2016-2020**

**Oleh:**

**Ummul Husnul**

Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia

Email: [husnulummul@gmail.com](mailto:husnulummul@gmail.com)

**Junaidin Zakaria**

Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muslim Indonesia

Email: [junaiddinzakaria@gmail.com](mailto:junaiddinzakaria@gmail.com)

**Dahlia Baharuddin**

Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muslim Indonesia

[dahliah.dahliah@umi.ac.id](mailto:dahliah.dahliah@umi.ac.id)

---

**Article Info**

*Article History :*

*Received 16 Agustus - 2022*

*Accepted 25 Agustus - 2022*

*Available Online*

*30 September - 2022*

---

**Abstract**

*How Islamic Economics View Inequality in Economic Development in West Sulawesi Province in 2016-2020. This study uses secondary data, which was obtained from the total number of regencies/cities in West Sulawesi Province from the 2016-2020 period. The results of this study indicate that: (1) the number of workers has a significant positive effect on inequality in economic development in Sulawesi province. West, (2) The Allocation of General Assistance Funds Has a Significant Positive Effect on Economic Development Inequality in West Sulawesi Province 2016.2020. The results of this study show that: the number of workers has an effect on the number of unemployed so that it has an impact on the growth rate of inequality in economic development in the province of West Sulawesi, then the amount of the allocation of general aid funds that are not evenly distributed causes development gaps in the regions, so this has an impact on the growth rate of inequality. Economic Development in West Sulawesi Province 2016-2020.*

---

*Keyword :*

*Number of Manpower,  
Allocation of General Funds,  
Inequality of Economic  
Development*

---

**1. PENDAHULUAN**

Secara umum, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita atau pendapatan masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang lama. Menurut Sen, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilihat sebagai tujuan, pembangunan harus lebih memperhatikan upaya peningkatan kualitas hidup dan kebebasan. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara.

Pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di

samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Pembangunan itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda-beda (Michael & Stephen, 2011).

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus menyebar ke semua kelompok pendapatan, termasuk masyarakat miskin. Perekonomian yang semakin maju dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan struktur perekonomian suatu wilayah. Dalam hal lain meningkatnya dan menurunnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah

di pengaruhi oleh penyerapan Angkatan kerja (Fahrizal, Zamzami & Muhammad, 2021).

Pertumbuhan ekonomi menurut (Sukirno et al., 2011). adalah proses kenaikan output per kapita secara konstan dalam jangka panjang. Peningkatan output merupakan akibat dari peningkatan aktivitas produksi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya, merupakan hal yang sangat fluktuatif, atau tidak menentu, tergantung bagaimana pemerintah suatu wilayah melihat potensi dan melakukan pengelolaan yang produktif pada potensi suatu daerah, menurut Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktifitas produksi saja, lebih dari itu pertumbuhan ekonomi merupakan aktifitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktifitas manusia yang ditujukan untuk kemajuan sisi materi dan spiritual manusia (Huda, 2015).

Pendapat ahli di atas memberikan gambaran bahwa pemerintah memegang kendali penuh atas peningkatan pertumbuhan ekonomi, salah satu perannya adalah kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur suatu wilayah, melalui pemberian alokasi dana bantuan untuk pembangunan suatu daerah.

Peran alokasi bantuan untuk pertumbuhan suatu wilayah termaktub dalam aturan pemerintah Dana Bantuan Pembangunan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri keuangan menetapkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, yakni Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari hal ini dapat diasumsikan tinggi alokasi yang diberikan oleh negara kepada suatu daerah akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang positif.

Dilihat dari segi wilayah, Sulawesi barat merupakan salah satu wilayah dalam negara Republik Indonesia, memiliki struktur wilayah yang cukup berpotensi, namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup berfluktuatif, beberapa hal yang memiliki peran dalam

pertumbuhan ekonomi yakni, jumlah Angkatan kerja, serta persentase alokasi dana bantuan pemerintah di sektor pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi barat. Berikut tabel yang memperlihatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat:

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	6,01
2017	6,39
2018	6,26
2019	5,56
2020	-2,40

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020 cenderung berfluktuatif dapat dilihat pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,01% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 6,39%. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 6,26% dan kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 5,56% pada tahun 2019, hingga tahun 2020 terus menurun sebesar -2,40%.

Meskipun Provinsi Sulawesi Barat memiliki persentase pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, untuk membantu meningkatkan pembangunan daerah. Secara umum, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi. Untuk memajukan pembangunan ekonomi, diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Berikut ini table 2. PDRB wilayah Sulawesi Barat, tahun 2016-2020:

Kabupaten dan Provinsi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	2992,32	3180,58	3373,36	3572,16	3522,82
Polewali Mandar	7784,97	8330,45	8846,18	9390,94	9243,36
Mamasa	1881,28	1995,43	2116,20	2240,36	2211,84
Mamuju	6974,98	7470,71	7921,24	8335,09	8146,54
Pasangkayu	6257,31	6655,78	7006,93	7315,34	7115,89
Mamuju Tengah	1902,19	2005,78	2120,42	2230,79	2207,93
Sulawesi Barat	27524,77	29282,49	31114,14	32843,81	32054,50

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan table 2. di atas, maka table tersebut memberikan gambaran mengenai

pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif, namun dapat dilihat juga bahwa Provinsi Sulawesi Barat mempunyai PDRB per kapita yang terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dalam tabel pada tahun 2017 PDRB Provinsi Sulawesi Barat sebesar 29 282,49, dan selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 31 114,14. Dan pada tahun 2020 sebesar, 32 874,63, sehingga pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2016-2020 dikategorikan mengalami peningkatan. Penyebab ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya adalah perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja, investasi yang berbeda-beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, alokasi dana bantuan pembangunan antar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih menekankan pada efisiensi dan produktivitas penduduk. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang (Suprianto, Binar & Julia, 2015). Tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya juga harus menghilangkan dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagi daerah yang sudah lebih dulu membangun tentunya lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana, misalnya iklim usaha yang baik, layanan perbankan yang baik sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya. Proses ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antar daerah sebenarnya merupakan akibat dari proses pembangunan itu sendiri. Berdasarkan penyebab ketimpangan wilayah antar wilayah dari tahun ke tahun yang cenderung melebar, maka dapat dibuat asumsi, yakni ketimpangan pembangunan ekonomi yang dipengaruhi oleh Jumlah Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat dengan judul penelitian sebagai berikut “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2016-2020”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa, tenaga kerja yang dalam usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Menurut pendapat Simanjuntak (2002), tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Menurut UU Nomor 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lewis mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan yaitu, kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Menurut Hasan, tenaga kerja dalam islam adalah tenaga kerja yang memiliki nilai positif yaitu Bekerja keras dengan ikhlas dan mencintai pekerjaannya, Hidup tertib dan penuh disiplin, Menjalin ukhuwah islamiyah dan suka berjamaah, Berlaku jujur, pandai bersyukur, memuliakan mitra, memaksimalkan ikhtiar dan doa, mampu mengembangkan potensi diri, menepati janji, taat beribadah, istiqomah menghindari kemungkaran, bekerja dengan tulus, bersahabat dengan lingkungan, suka belajar dari pengalaman, menganut pola hidup hemat, berlaku amanah, dan percaya diri.

## 2. Dana Alokasi Bantuan Pembangunan

Dana alokasi bantuan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan daerah. Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sumber dana. Untuk mencapai keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Namun potensi dan pemanfaatan sumber daya tersebut bervariasi antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Marisa dan Hutabarat (1988) serta Nurmanah (1989) dalam Hartono (2008) mengidentifikasi bahwa ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dengan demikian tidak mengherankan bila keberhasilan pembangunan antar daerah berbeda-beda. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, misal dengan memberikan bantuan kepada daerah untuk mempercepat pembangunan daerah.

Dana alokasi bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan

stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Dana perimbangan terdiri dari, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Orang Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi”.

### Dana Alokasi Umum

Dana alokasi bantuan pembangunan daerah merupakan salah satu sumber keuangan untuk melakukan pembangunan daerah. Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sumber dana. Untuk mencapai keberhasilan suatu program pembangunan sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Sugeng, 2013). Dana Alokasi Umum merupakan block grants yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

### Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan

fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tarqiqi mengemukakan mengenai beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi islam yaitu, bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Islam berada dalam posisi lebih utama di mana yang ingin diciptakan yaitu masyarakat yang sama dari semua aspek (Nurul, 2015).

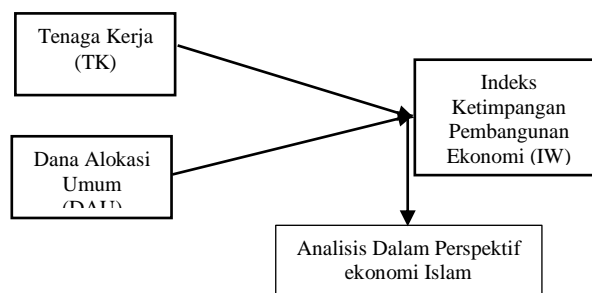
### Ketimpangan Ekonomi

Menurut Mudrajad Kuncoro, kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Menurut Hipotesa Neo Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Teori ketimpangan dan disparitas antar wilayah dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson yang menganalisa distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional pada suatu negara, ternyata dijumpai dalam suatu negara terdapat suatu wilayah berpendapatan tinggi yang selalau diikuti sekelompok wilayah berpendapatan menengah dan rendah. Islam sebagai sistem hidup (way of life) dan merupakan agama

yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran maka hubungan antara variabel independen (bebas) dengan variabel (terikat) dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



Berdasarkan Pembahasan serta kerangka konseptual pada gambar 1, maka hipotesis dalam penelitian kami adalah:

- H1: Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi barat.
- H2: Dana Alokasi Umum Pembangunan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.
- H3: Jumlah Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Barat.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian kami menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi seluruh 6 kabupaten/kota dengan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2022. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan

pengolahnya. Dalam penelitian ini kami mendapatkan data sekunder dengan mengutip literatur dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian data-data dari instansi pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat.

Populasi bersumber dari data sekunder (time series) tahun 2016-2020, yang mana data ini diperoleh dari akumulasi Jumlah Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel lima tahun yaitu dari tahun 2016-2020. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah metode sensus hal ini berdasar pada jumlah populasi relative sedikit yakni 6 populasi, kemudian metode sensus layak digunakan karena populasi sangat bervariasi, atau bersifat heterogen, sehingga penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode sensus.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dengan menginterpretasikan nilai rata-rata dari masing-masing indikator pada variabel penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai indikator apa saja yang membangun konsep model penelitian secara keseluruhan. Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaruh variabel Jumlah jumlah Tenaga Kerja dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam hal ini data yang diperoleh dari laporan tahunan selama lima tahun (2016-2020) yang ada di Badan pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.

##### Jumlah Tenaga Kerja (X1)

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja di berbagai sektor dan lapangan usaha disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002). Dengan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas, dan produksi akan naik, sehingga laju pertumbuhan juga akan meningkat. Adapun data tenaga kerja selama tahun 2016-2020 di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2016-2020).

No	Tahun	Tenaga kerja
1	2016	624,182
2	2017	595,004
3	2018	640,885
4	2019	660,481
5	2020	672,986

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil ini menunjukkan bahwa angka jumlah tenaga kerja tinggi pada 2020, dengan persentase sebesar, 672,986 dan angka jumlah tenaga kerja terendah berada pada tahun 2017 sebesar 595,004 sehingga dapat di asumsikan bahwa adanya peningkatan jumlah tenaga kerja pada provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

##### Dana Alokasi Umum (X2)

Realisasi pembangunan daerah di sektor ekonomi tidak terlepas dari hal bantuan dana alokasi bantuan pemerintah, hal ini tentunya menjadi efek yang penting, Dalam melaksanakan pembangunan suatu daerah maka diperlukan sumber dana, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan daerah tersebut bergantung kepada sumber daya yang tersedia pada daerah tersebut. Adapun Dana Alokasi Umum di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Dana Alokasi Umum Sulawesi Barat Tahun (2016-2020).

No	Tahun	DAU
1	2016	3 224 886 149
2	2017	3 187 547 830
3	2108	3 199 855 201
4	2019	3 335 199 028
5	2020	3 052 024 229

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil ini menunjukkan bahwa untuk Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2016-2020, dengan demikian dapat dilihat bahwa Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016-2020 tidak merata, hal ini ditunjukkan dengan adanya daerah yang menerima bantuan relatif tinggi dan relatif rendah.

##### Pengujian Hipotesis

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan melalui pengujian koefisien jalur pada model persamaan struktural. Dimana hasil analisis secara lengkap dapat dilihat pada tabel 29. berikut:

- 1) H1: Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi barat. Pada hasil uji

persamaan linier, maka diperoleh hasil nilai signifikansi untuk variable tenaga kerja sebesar, 0,533, di mana angka ini lebih besar dari angka probabilitas ( $0,533 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 di tolak.

- 2) H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Pada hasil uji persamaan linier, maka diperoleh hasil nilai signifikansi untuk variable alokasi dana alokasi umum sebesar, 0,769, di mana angka ini lebih besar dari angka probabilitas ( $0,769 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 di tolak.
- 3) H3: Jumlah Tenaga Kerja dan Alokasi Umum negatif terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Barat. Pada hasil uji persamaan linier, maka diperoleh hasil uji model atau dalam hal ini disebut dengan uji F, dimana nilai signifikansi untuk variable independent (tenaga kerja dan alokasi dana alokasi umum) sebesar, 0,249, di mana angka ini lebih besar dari angka probabilitas ( $0,0249 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 di tolak.

## **Pembahasan**

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Analisis Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat diamati dari hasil uji persamaan linier pada Tabel 29. Dari Tabel tersebut menunjukkan tenaga kerja berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada Sulawesi Barat, akan memberikan nilai pengurangan dari jumlah pengangguran, sehingga hal ini berdampak pada adanya penekanan mengenai laju ketimpangan pembangunan ekonomi Di wilayah Barat Sulawesi Barat. Bertambahnya Angkatan kerja, tentunya sejalan dengan laju pertumbuhan pengangguran, secara hafiah akan berdampak pula pada daya beli masyarakat yang tinggi serta akan memberikan peningkatan pada pendapatan masyarakat. Hasil penelitian di atas, memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Feni Nursetianingrum (2018), yang menemukan hasil bahwa, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap

ketimpangan pembangunan ekonomi Di Provinsi Lampung.

### **2. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat diamati dari hasil uji persamaan linier pada Tabel 29. Dari Tabel tersebut menunjukkan alokasi dana alokasi umum berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat. Hasil ini menunjukkan bahwa besaran dari alokasi bantuan umum di sector real untuk pembangunan ekonomi berdampak pada laju ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat. Kemudian bila dilihat dari siklus tahun 2016 hingga tahun 2020, laju ketimpangan pembangunan ekonomi sangat bergerak pluktuatif, hal ini di sebabkan oleh besaran alokasi bantuan yang setiap tahunnya mengalami perubahan sesuai dengan rancangan penganggaran dan kebutuhan pembangunan di provinsi Sulawesi barat. Akibat dari besaran alokasi yang tidak merata, mengakibatkan pembanagan di daerah kabupaten atau kota mengalami perbedaan peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zul Hazmi Alfurqani, Dwi Widiarsih, Jeki Algusri (2021) yang menemukan bahwa Tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau diukur dengan Indeks Williamson pada tahun 2011-2013 mengalami ketimpangan sedang, kemudian memasuki tahun 2014-2020 ketimpangan di Provinsi Riau tergolong ketimpangan rendah. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh DAU.

## **5. KESIMPULAN**

1. Tenaga kerja berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, dengan nilai koefisien regresi sebesar, 0,823, nilai ini menunjukkan semakin tingginya angkatan kerja, maka akan mengurangi angka pengangguran, yang berefek mpada laju pertumbuhan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, dengan nilai koefisien regresi sebesar, 0,674, nilai ini menunjukkan semakin bahwa dana alokasi umum (DAU), di sector real untuk pembangunan ekonomi berdampak pada laju

ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat.

3. Berdasarkan uji pengukuran tingkat pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016-2020, dengan Menggunakan Pengukuran Indeks Williamson, maka disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi terendah terjadi pada tahun, 2016 dengan angka sebesar, 0,024, sedangkan untuk ketimpangan pembanguana eonomi tetinggi terjadap pada tahun 2017, dengan angka sebesar 0,807

## 6. REFERENSI

- BPS. 2015. Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Sumatera Selatan.
- Fahrizal, Zamzami, Muhammad Safri (2021) Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kesempatan Kerja Di Provinsi Jambi, Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No. 1.
- Feni Nursetianingrum. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016. Lampung.
- Huda, N. (2015). Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukirno, S. (2011). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Suprianto, Binar Dwiyanto Pamungkas, Julia Zikriana. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015. Penerbit, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 14, No. 2Q. Sumbawa.
- Wihastuti, Rahmatullah. 2017, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Jurnal Gama Societa, Vol.1, No.1.
- Zebua Widya Ningsih. Djaimi Bakce, Syaiful Hadi. 2015. Analisis Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Riau. Penerbit, Jurnal Agribisnis Ekonomi Vol. 6, No. 2, Riau
- Zuriah Nurul. Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi. Penerbit, Bumi Aksara. Jakarta.
- Zul Hazmi Alfurqani, Dwi Widiarsih, Dan Jeki Algusri, (2021) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau, Vol. 1 No. 1, September 2021.